



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Periode 2024-2026.

Renstra ini memuat Isu-isu Strategis, tujuan, kebijakan, dan program-program serta sasaran pembangunan sektor pendidikan yang berlaku untuk wilayah Kabupaten Kabupaten Seruyan. Selanjutnya program-program yang tertuang dalam Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Seruyan setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Awal Rencana Strategis Dinas Pendidikan priode 3 (Tiga) tahunan Kabupaten Seruyan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang bersipat membangun dari semua pihak.

Semoga program-program yang teruang dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Kabupaten Seruyan tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan

RIZDI HIDAYAT, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19790821 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PENDIDIKAN.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (SPM)	II-34
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Isu Strategis	III-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Cascading Dinas Pendidikan	IV-6
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya sehingga keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2023–2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 ditetapkan paling lambat Minggu Keempat Bulan Maret Tahun 2023, sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan April Tahun 2023.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 harus memperhatikan :

- a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024;
- b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan tahun 2025;
- c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2018 – 2023;



- d. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
- e. Isu – isu strategis yang berkembang;
- f. Kebijakan nasional;
- g. Regulasi yang berlaku.

Penentuan Program/Kegiatan/SubKegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah agar memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing – masing melalui evaluasi capaian RKPD dan renja PD sampai dengan Tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu – isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g.** Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir di tahun 2023. Oleh karena itu, Kabupaten Seruyan harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024–2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024–2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005–2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Nasional.



RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024– 2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005–2025 dengan Visi: “Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2024–2026. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Seruyan dan Renstra Kabupaten Seruyan tahun 2024–2026.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen Nasional, Provinsi dan Daerah sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 mengacu pada pokok pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025 sebagai tahap akhir untuk mencapai visi “Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan juga harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 untuk menjaga sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu – isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang akan berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan. Untuk menjaga sinergitas tujuan pembangunan, maka Rencana



Pembangunan Daerah Seruyan Tahun 2024–2026 harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Target indikator makro sekurang-kurangnya sama dengan target yang telah ditentukan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Seruyan. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024– 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk periode 2024–2026 yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD di setiap tahunnya. Sasaran tahunan dan arah kebijakan dalam RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan dalam setiap tahun RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Untuk menjaga sinergitas dan sinkronisasi antara RPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah maka setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 juga berpedoman pada dokumen kewilayahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019–2039. Keselarasan RPD dengan RTRW Kabupaten Seruyan telah melalui proses penelaahan dan penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang

wilayah. RTRW Kabupaten Seruyan sebagai perencanaan spasial diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Seruyan, sehingga pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan sesuai dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Seruyan. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024–2026 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan, serta implementasi dari misi tahap terakhir dari RPJPD untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan RPD diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan pasca Pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian indikator serta target pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 – 2039;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 ini dimaksudkan sebagai untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan hingga tahun 2026 dan sebagai jembatan bagi Kabupaten Seruyan yang masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di Tahun 2023 untuk memberikan arahan bagi stakeholders dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam rencana pembangunan tahunan. RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 disusun dengan tujuan :

- a. Memberikan landasan dan pedoman Penjabat Bupati dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2024-2026;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2024–2026;



- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat; dan
- e. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai maksud tersebut Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan disusun agar menjadi pedoman lengkap yang memuat:

1. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan kependidikan, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini untuk memperoleh perhatian khususnya 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Rumusan agenda pokok pembangunan kependidikan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan kependidikan sebagai penjabaran pokok dari motto Dinas Pendidikan yang mengacu pada pemangku kepentingan (*Stakeholders*) pembangunan daerah, dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi pendidikan yang diinginkan 3 (tiga) tahun ke depan. (2024–2026).
3. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Seruyan.



Dokumen Renstra Dinas Pendidikan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pelaksanaan poin (1) dan (2) di atas.
2. Sebagai kerangka dasar pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan sesuai motto Dinas Pendidikan
3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan bidang Kependidikan.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara Perangkat Daerah (PD), antara ruang dan waktu maupun antara Pemerintah Pusat dan Propinsi dengan Daerah.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
6. Menggalang partisipasi masyarakat
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan daerah yang tertinggi hirarkinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJM Daerah merupakan penjabaran Isu Strategis dan program Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya setiap tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, memuat Isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan sebagai satu organisasi Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Desentralisasi dan pembantuan di bidang Pendidikan, menyusun Rencana Strategi periode 2024–2026, memuat Isu Strategis, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Seruyan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024-2026 dan kebijakan Nasional bidang Pendidikan. Selanjutnya Rancangan Renstra Disdik tersebut akan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Renja Disdik yang memuat program dan kebijakan setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang didelegasikan dan atau dilimpahkan oleh kepala daerah sesuai dengan kebijakan kepala daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan, Fungsi, dan Tugas organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pendidikan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.



Untuk melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan, dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan;
- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- d. Pengembangan, sosialisasi dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan;
- e. Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan Dinas Pendidikan;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- h. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan;
- b. Membina, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan rencana, program dan kebijakan di bidang Pendidikan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan kerja sama antar instansi terkait maupun dengan pihak pusat agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan;
- d. Membina bawahan melalui bimbingan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi pada Sekertariat, Bidang, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundangan yang berlaku;



- e. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati berdasarkan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan sebagai masukan bagi Pimpinan dan mendapat petunjuk lebih lanjut.

2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan.

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dasar, pendidikan PAUD dan Pendidikan Formal dan NonFormal;
- c. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
- d. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan;
- e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;



- g. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, Pendidikan anak Usia Dini dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan pendidikan Anak Usia Dini, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama1, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan Dasar, dan pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan; dan
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan.

Untuk melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Membuat rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;



- e. Menyelenggarakan administrasi tata usaha kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun DUK, Daftar Nominatif dan Formasi PNS, Diklat PNS, Surat Ijin, Cuti, Sakit, serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan, penyusunan program dan penyiapan dana serta pertanggung jawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi asset dinas, pemeliharaan barang, membuat usulan/mengadakan ATK dan perlengkapan rumah tangga dinas serta menyusun rencana tahunan barang unit (RTBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Mengkoordinir seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka menyusun RENJA, RENSTRA, LAKIP, bahan LKPJ, bahan LPPD, Penetapan Kinerja, SPM SP, RKA, RO dan DPA;
- i. Memproses usulan pengangkatan/ pemberhentian satuan pemegang kas, P2BJ, Pemeriksa Barang dan Pengurus Barang;
- j. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, rumah tangga, dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada Bidang lain;
- k. Mengkoordinir penyusunan laporan berkala Dinas;
- l. Menilai sasaran kerja pegawai berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.



Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan, menyusun, mengelola, memantau, dan mengevaluasi bahan rumusan kebijakan rencana program kegiatan dan anggaran, data dan informasi, keuangan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

A. Sub Bagian Penyusun Program

- a. Mempunyai tugas Menyiapkan, menyusun, mengelola memantau dan mengevaluasi bahan rumusan kebijakan rencana program kegiatan dan anggran, data dan informasi.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan berdasarkan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan berdasarkan kebijakan teknis dinas agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja sub bagian perencanaan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan agar semua rencana dan perjanjian kinerja dapat telaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengevaluasi biaya kantor dan pembiayaan lainnya;
- f. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten agar kebijakan umum dinas berdaya guna dan berhasil guna;



- g. Melaksanakan analisis dan penyajian data berdasarkan program dan kegiatan dinas agar tersedia data yang akurat;
- h. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pendidikan, berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan renstra dan renja dinas agar semua program dan kegiatan berdaya guna dan berhasil guna;
- j. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas berdasarkan renstra dan renja dinas agar semua program dan kegiatan dinas berjalan lancar;
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas berdasarkan renstra dan renja dinas agar pelaksanaan program dan kegiatan dinas tidak terdampak;
- l. Menyusun dan menyampaikan data laporan tentang realisasi dan penyerapan anggaran dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas berdasarkan program dan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- n. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas berdasarkan program dan kegiatan dinas agar pelaksanaan program dan kegiatan dinas terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- o. Menyusun laporan kinerja dinas berdasarkan program dan kegiatan dinas agar dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil kebijakan;
- p. Melaksanakan fasilitasi akreditasi dan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- q. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Penyusun Program;



- r. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyusun Program;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusun Program; dan
- t. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar pembinaan karier PNS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Sub Bagian Keuangan

- a. Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi.
- b. Merencanakan pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Dinas meliputi Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran, Pembukuan, akuntansi, verifikasi tindak lanjut LHP serta pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan anggaran program Dinas Pendidikan;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan anggaran verifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan tata usaha keuangan atas pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengusulan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);



- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyeter dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selajutnya disetor ke Kas Negara;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan keuangan dinas;
- i. Melaksanakan verifikasi berkas pengajuan keuangan kegiatan dinas yang diajukan oleh masing-masing bidang/PPTK untuk diteruskan kepada Pengguna Anggaran;
- j. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahannnya sampai habis agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Membuat laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan per kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan perencanaan, pembayaran dan pengadministrasian dan/atau pertanggungjawaban gaji pegawai dinas;
- m. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Peserta Didik, Pembangunan Karakter SD dan Kelembagaan dan;
- b. Seksi Kurikulum, Guru, dan Tenaga Kependidikan SD.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan lintas kabupaten,



sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemantauan dan evaluasi pendidikan, ujian sekolah, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), pendidikan dasar sesuai kewenangannya, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar meyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. Penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. Pelaporan pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;



- i. Monitoring Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sekolah dasar;
- j. Koordinasi data dan informasi di bidang Pendidikan sekolah dasar.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pendidikan sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan lintas kabupaten/kota untuk pendidikan sekolah dasar;
- c. Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kewenangannya;
- d. Memfasilitasi bantuan seragam peserta didik sekolah dasar sesuai kewenangannya;
- e. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan sekolah dasar;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi asesmen kompetensi minimum sekolah dasar;
- g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi minimum;
- h. Menyediakan biaya penyelenggaraan asesmen kompetensi minimum;
- i. Membina dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan, pendidikan bertaraf nasional dan internasional;
- j. Mengalokasikan tenaga potensial guru dan tenaga kependidikan di daerah untuk pendidikan sekolah dasar;
- k. Membantu pelaksanaan akreditasi sekolah dasar;
- l. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;



- o. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- p. Menilai sasaran kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pendidikan sekolah Dasar berdasarkan sasaran kinerja yang dicapai sebagai pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- q. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pegawai; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

4. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Peserta Didik, Pembangunan karakter SMP dan Kelembagaan dan;
- b. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan lintas kabupaten/kota, sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemantauan dan evaluasi pendidikan bertaraf internasional, ujian sekolah, Asesmen Kompetensi Minimum, pendidikan dasar sesuai kewenangannya, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;



- b. Penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- h. Pelaporan pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- i. Monitoring Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sekolah menengah pertama; dan
- j. Koordinasi data dan informasi di bidang Pendidikan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pendidikan sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan sekolah Menengah Pertama;



- b. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan lintas kabupaten/kota untuk pendidikan sekolah menengah pertama;
- b. Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama sesuai kewenangannya;
- c. Memfasilitasi bantuan seragam peserta didik sekolah menengah pertama sesuai kewenangannya;
- d. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi asesmen kompetensi minimum sekolah menengah pertama;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi minimum;
- g. Menyediakan biaya penyelenggaraan asesmen kompetensi minimum;
- h. Membina dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan, pendidikan bertaraf nasional dan internasional;
- i. Mengalokasikan tenaga potensial guru dan tenaga kependidikan di daerah untuk pendidikan sekolah menengah pertama;
- j. Membantu pelaksanaan akreditasi sekolah menengah pertama;
- k. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- l. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
- m. Menilai sasaran kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pendidikan sekolah Dasar berdasarkan sasaran kinerja yang dicapai sebagai pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pegawai; dan



- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal dan;
- b. Seksi Pembinaan Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Kelembagaan PAUD dan Non Formal.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Pendidikan NonFormal, dan Pendidikan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini, Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal meyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian ,kelembagaan dan sarana prasarana , serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan ijin pendirian, penataan, dan penutupan, satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;



- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal; dan
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal mempunyai uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan koordinasi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- c. Menyiapkan bahan rumusan dan koordinasi pelaksanaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan pada anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- d. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pada anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;



- f. Melaksanakan kebijakan peserta didik dan pembangunan karakter pada anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- g. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- h. Menyusun bahan penerbitan ijin pendirian satuan pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- i. Menyusun bahan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- j. Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian satuan pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- k. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- l. Menyusun bahan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan sarana prasarana anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal dan;
- p. Melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal.



7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Pelaksana merupakan Pegawai Negeri Sipil selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional tertentu.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah Guru berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	3
3	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)	109
4	Diploma I	-
5	Diploma II	103
6	Diploma III	11
7	Diploma IV	-
8	Sarjana (S-1)	1.058
9	Magister (S-2)	15
10	Doktoral (S-3)	-
Jumlah Total		1.129

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

Jumlah Pangkat/Golongan ASN

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan I	3
2	Golongan II	59
3	Golongan III	926
4	Golongan IV	236
Jumlah Total		1.224

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022



Jumlah Pangkat Struktural/Fungsional ASN

No	Pangkat Struktural/Fungsional	Jumlah
1	Eselon I	-
2	Eselon II	1
3	Eselon III	4
4	Eselon IV	8
5	Eselon V	-
6	Fungsional Umum	67
7	Fungsional Tertentu	-
	a. Guru	1.114
	b. Penilik PAUD/NI	-
	c. Pengawas Sekolah	15
	d. Pamong Belajar	-
Jumlah Total		1.224

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

Data Pegawai Non ASN

No	Pegawai Non ASN	Jumlah
1	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	400
2	Guru Tidak Tetap (GTT)	681
3	Pegawai Kontrak Daerah (PKD)	60
4	Guru Tetap Yayasan (GTY)	-
Jumlah Total		1.141

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

Jumlah Kualifikasi Pendidikan PTT dan GTT

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		
		PTT	GTT	PKD
1	SD/SMP	10	-	-
2	SMA/Diploma I/Diploma II	310	158	-
3	Diploma III	14	8	-
4	Sarjana (S-1)	66	514	60
5	Sarjana (S-2)	-	1	-
Jumlah Total		400	681	60

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kondisi Bangunan Sekolah SD/MI Tahun 2022

No	Kab. Seruyan	Ruang Kelas				Ruang Perpustakaan				WC Guru				WC Siswa			
		B	RR	RS	RB	B	RR	RS	RB	B	RR	RS	RB	B	RR	RS	RB
1	Kec. Batu Ampar	20	39	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	4	5	0	1
2	Kec. Danau Seluluk	92	49	6	0	2	3	0	0	2	4	0	0	9	6	0	2
3	Kec. Danau Sembuluh	26	52	4	4	0	4	0	0	2	1	0	0	1	10	1	1
4	Kec. Hanau	59	70	1	12	2	3	0	0	5	3	0	0	11	8	0	1
5	Kec. Seruyan Hilir	102	89	4	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	19	1	0
6	Kec. Seruyan Hilir Timur	14	41	11	8	0	2	0	0	2	1	0	0	3	6	0	4
7	Kec. Seruyan Hulu	48	70	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	Kec. Seruyan Raya	26	63	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0
9	Kec. Seruyan Tengah	54	84	18	8	0	3	1	0	2	1	0	1	3	7	0	1
10	Kec. Suling Tambun	29	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Jumlah		478	589	72	39	5	19	1	0	13	15	0	1	35	70	2	10

Keterangan :

B : Baik; RR : Rusak Ringan; RS : Rusak Sedang; RB : Rusak Berat

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

Kondisi Bangunan Sekolah SMP/MTs Tahun 2022

No	Kab. Seruyan	Ruang Kelas				Ruang Perpustakaan				WC Guru				WC Siswa			
		B	RR	RS	RB	B	RR	RS	RB	B	RR	RS	RB	B	RR	RS	RB
1	Kec. Batu Ampar	3	7	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	5	0	1
2	Kec. Danau Seluluk	32	16	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	9	6	0	2
3	Kec. Danau Sembuluh	0	24	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	10	1	1
4	Kec. Hanau	29	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	8	0	1
5	Kec. Seruyan Hilir	17	28	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	1	0
6	Kec. Seruyan Hilir Timur	6	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	4
7	Kec. Seruyan Hulu	7	16	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	Kec. Seruyan Raya	17	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
9	Kec. Seruyan Tengah	8	30	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	3	7	0	1
10	Kec. Suling Tambun	0	6	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	5	0	0
Jumlah		119	181	24	4	3	4	0	0	6	4	0	0	35	70	2	10

Keterangan :

B : Baik; RR : Rusak Ringan; RS : Rusak Sedang; RB : Rusak Berat

Kondisi Bangunan Sekolah SMA/MA Tahun 2022

No	Kab. Seruyan	Ruang Kelas				Ruang Perpustakaan				WC Guru				WC Siswa			
		B	R R	R S	R B	B	R R	RS	RB	B	R R	R S	R B	B	R R	R S	R B
1	Kec. Batu Ampar	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2	Kec. Danau Sembuluh	8	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0
3	Kec. Hanau	1 3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
4	Kec. Seruyan Hilir	2 0	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4	2	0	0
5	Kec. Seruyan Hilir Timur	3	3	6	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
6	Kec. Seruyan Hulu	8	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
7	Kec. Seruyan Raya	6	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0
8	Kec. Seruyan Tengah	1 5	4	1	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	3	0	0
Jumlah		7 6	2 2	7	2	3	5	1	1	5	6	0	0	1 2	1 2	0	0

Keterangan :

B : Baik; RR : Rusak Ringan; RS : Rusak Sedang; RB : Rusak Berat

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

**Kondisi Bangunan Sekolah SMK Tahun 2022**

No	Kab. Seruyan	Ruang Kelas				Ruang Perpustakaan				WC Guru				WC Siswa			
		B	R R	R S	R B	B	R R	RS	RB	B	R R	R S	R B	B	R R	R S	R B
1.	Kec. Danau Sembuluh	6	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0
2.	Kec. Hanau	17	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0
3.	Kec. Seruyan Hilir	18	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0
4.	Kec. Seruyan Raya	5	2	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0
	Jumlah	46	6	3	0	4	2	0	0	8	0	0	0	26	0	0	0

Keterangan :
B : Baik; RR : Rusak Ringan; RS : Rusak Sedang; RB : Rusak Berat

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi pendidikan di Kabupaten Seruyan lima tahun terakhir sebagai berikut:

2.3.1 Perkembangan Jumlah Siswa Enam Tahun terakhir

Tabel 2.2
Keadaan Siswa Enam Tahun Terakhir

Jenjang/Tahun	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TK/RA	7.161	7.299	7.560	5.035	5.290	5.373
SD/MI	20.442	23.691	20.589	20.394	21.097	17.640
SMP/MTs	7.575	7.722	7.596	11.839	8.497	7.705
SMA/MA	2.520	2.628	2.924	2.706	3.536	2.707
SMK	1.639	1.658	1.804	1.814	1.789	1.692

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

Jumlah siswa peserta didik di jenjang pendidikan formal di Kabupaten Seruyan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah Kabupaten Seruyan dengan kabupaten lainnya, selain juga karena adanya pemerataan kualitas pendidikan antar kabupaten/kota di Kabupaten Seruyan. Namun untuk jenjang pendidikan non formal kecenderungannya mengalami peningkatan, sehingga secara agregasi jumlah peserta didik di Kabupaten Seruyan memiliki tren meningkat.



2.3.2 Perkembangan Jumlah Lembaga

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Lembaga Enam Tahun Terakhir

Jenjang/Tahun	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TK/RA	96	101	212	214	114	115	213	215
SD/MI	167	170	171	172	170	169	166	166
SMP/MTs	58	64	64	71	70	67	66	66
SMA/MA	11	16	16	16	16	16	13	13
SMK	6	6	6	6	6	6	7	7

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

Sejalan dengan penurunan jumlah siswa, jumlah lembaga pendidikan formal juga mengalami penurunan. Penurunan ini lebih merupakan pengefektifan dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan dengan *cararegrouping* sehingga kedepannya dapat dicapai tata kelola lembaga pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk lembaga pendidikan non formal jumlahnya memiliki kecenderungan tren yang meningkat. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah peserta didik di jenjang non formal. Peningkatan lembaga non formal terbesar ada di jenjang PAUD non formal (TPA, KB).

2.3.3 Perkembangan Angka Putus Sekolah

Tabel 2.4
Perkembangan Angka Putus Sekolah Lima Tahun Terakhir

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2015	0,2	0,43	0,17
2016	0,27	0,81	1,08
2017	0,03	0,09	0,39
2018	0,01	0,03	0,10
2019	0,40	0,80	1,37
2020	0,89	3,93	6,00

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022



Perkembangan positif juga tampak pada perkembangan angka putus sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum semua jenjang menunjukkan penurunan angka putus sekolah dengan trend yang menurun. Hal ini merupakan cerminan dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

2.3.4 Perkembangan Akses Pendidikan

Tabel 2.6
Perkembangan Akses Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun	APM	APK	APS
1.	SD	2013	92,23	114,64	92,23
	(Usia 7-12th)	2016	95,50	106,88	95,50
		2017	95,08	106,74	95,08
		2018	92,38	112,00	82,00
		2019	92,39	93,39	92,39
		2020	97,99	116,48	97,99
		2021	98,24	114,94	99,43
		2022	99,16	110,64	98,91
2.	SMP	2015	70,30	95,23	70,30
	(Usia13-15th)	2016	70,40	92,38	70,40
		2017	74,70	93,22	74,70
		2018	59,96	89,48	45,51
		2019	64,91	70,54	66,93

		2020	81,28	87,42	83,28
		2021	89,53	93,62	82,53
		2022	80,84	86,74	80,84
3.	SMA/SMK	2015	52,70	63,14	52,70
	(Usia16-18th)	2016	50,40	68,44	50,40
		2017	52,10	84,47	52,10
		2018	45,11	53,38	45,11
		2019	51,39	57,04	51,39
		2020	47,87	50,26	47,87
		2021	47,49	57,21	47,49

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

Angka Partisipasi Murni (APM)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa APM Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI tahun 2013 yaitu 92,23 persen, namun pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan kembali menjadi 95,20 persen dan 95,60 persen. Selanjutnya tahun 2016 sampai dengan 2017 terus mengalami penurunan hingga menjadi 95,08 persen. Melihat data tersebut dapat diartikan bahwa meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2020 menjadi 97,99 namun Kondisi tersebut bermakna bahwa anak usia sekolah SD/MI secara keseluruhan bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI.

Data diatas menyajikan data APM SMP/MTs selama kurun waktu 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi. dimana pada periode tahun 2013 yaitu 78,86 persen, Meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan kembali menjadi 67,34 persen, akan tetapi pada periode berikutnya hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 81,38 persen.



Selanjutnya, APM SMA/MA/SMK menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan. Dimana APM SMA/MA/SMK pada tahun 2013 mencapai 42,57 persen, Namun APM SMA/MA/SMK tersebut mengalami peningkatan kembali sampai dengan tahun 2020 hingga menjadi 47,87 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Berdasarkan data, diketahui bahwa APK di Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 untuk jenjang SD sebesar 114,64 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 108,31 persen. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 114,62 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali hingga menjadi 106,74, tahun 2020 menjadi 116,48 persen. Kondisi APK SD yang diatas 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk Seruyan yang bersekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Seruyan mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa APK SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 99,62 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2016 menjadi 92,38 persen, namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 87,42 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 12 sampai 15 tahun belum maksimal. Masih ada anak usia 12 sampai 15 tahun yang belum bersekolah. Sementara itu, APK SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 60,81 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 50,26 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa APS Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 fluktuasi, dimana APS Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 menjadi 92,23 persen, namun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan menjadi 95,20 persen dan 95,60 persen.



Pada tahun 2017 APS Jenjang Pendidikan Dasar terjadi penurunan kembali hingga menjadi 95,50 persen dan pada tahun 2020 menjadi 97,99 persen. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa APS di Kabupaten Seruyan untuk jenjang SMP pada tahun 2013 sebesar 78,86 persen, pada tahun 2014 kembali turun hingga menjadi 67,34 persen. Namun pada tahun 2015 sampai dengan 2017 terus terjadi peningkatan hingga menjadi 74,70 persen. Selanjutnya untuk jenjang SMA Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2013 menjadi 42,57 persen, pada tahun 2014 dan 2015 meningkat kembali menjadi 51,92 persen dan 52,70 persen. Meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali, namun meningkat lagi ditahun 2020 menjadi 83,28 persen.

Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4

Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4 di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2022 menunjukkan tren peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 79,89 persen, meningkat ditahun 2016 menjadi 80,33 persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 94,60 persen mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 83,56 persen. Adapun data Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4 tahun 2015-2022 di Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4
di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2022

Jenis Sekolah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kualifikasi Guru Yang Memiliki ijasah S1/D4	79,89	80,33	94,60	83,56	85,74	99,86	98,84	99,46

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022



Perkembangan Angka Melanjutkan

Adapun data mengenai Angka Melanjutkan di Kabupaten Seruyan Tahun 2015-2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Melanjutkan Enam Tahun Terakhir

Tahun	Jenjang	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA /SMK
2015	100	82,85
2016	91,65	90,09
2017	92,17	69,77
2018	87,17	65,94
2019	82,64	66,93
2020	85,00	63,11
2021	96,46	75,80
2022	95,97	67,52

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

Dari data yang ada diketahui bahwa angka melanjutkan di Kabupaten Seruyan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 angkanya sebesar 100 persen, mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 91,65 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2015, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 dan 2017 hingga menjadi 87,17 persen dan 82,64 persen, namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 95,97 persen.



Selanjutnya Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK pada tahun 2013 sebesar 82,85 persen, meningkat ditahun 2014 menjadi 90,09 persen, meskipun sempat mengalami penurunan ditahun 2015 dan 2016, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 66,93 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 67,52 persen.

Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu, rasio guru/murid juga indikator untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Di Kabupaten Seruyan Tahun 2014-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI									
Jumlah Guru	1.548	1.584	1.442	1.418	1.418	1.471	1.467	1.471	1.562
Jumlah Murid	20.957	20.801	19.747	20.422	23.691	20.589	20.624	21.097	20.213
Rasio	73,87	76,15	73,02	69,43	59,85	71,45	71,13	69,72	77,28
SMP/MTs									
Jumlah Guru	703	663	589	566	566	652	657	652	661
Jumlah Murid	6.931	7.312	7.043	7.149	7.722	7.596	7.251	8.497	7.256
Rasio	101,43	90,67	83,63	79,17	73,30	85,83	90,61	73,55	91,10

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022



Tabel 2.11
Perkembangan Kondisi Fisik Sekolah

Tahun	Jenjang	
	SD/MI	SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
	Kondisi Ruang Kelas Baik	
2015	163	70
2016	168	76
2017	168	76
2018	170	81
2019	171	86
2020	218	147
2021	292	204
2022	351	256

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2022 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 berjumlah 163 sekolah dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 351 sekolah.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015-2022 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 berjumlah 70 sekolah dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 256 sekolah.



2.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah

Dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seruyan, Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan menghadapi hambatan sebagaimana berikut:

1. Akses

- a. Masih ada warga kota yang belum menuntaskan pendidikan menengah;
- b. Masih terdapat anak putus sekolah (Penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD, Penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan Menengah Pertama, dan Penduduk usia 7-18 tahun jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) karena alasan pendanaan dan non pendanaan;
- c. Jumlah siswa kota yang sekolah di luar kota masih cukup tinggi;
- d. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK APM.

2. Mutu

- a. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
- c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Persebaran pendidik belum proporsional;
- e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
- f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;

3. Tata kelola

- a. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
- b. Lemahnya manajemen sekolah;
- c. Kompetisi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan.

Dari berbagai kendala di atas, jika disikapi dengan bijak justru dapat menjadi tantangan dan peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan kedepannya.



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja SPM Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Dinas Pendidikan tahun ke-					Realisasi Capaian Dinas Pendidikan Tahun Ke-					Rasio Capaian Dinas Pendidikan Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	100%	100%	n/a	95%	99%	100 %	100 %	n/a	64,91 %	91,47 %	100 %		n/a	72,12 %	96,28 %	100 %	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100%	100%	100%	n/a	95%	99%	100 %	100 %	n/a	70,49 %	79,68 %	100 %		n/a	78,32 %	83,87 %	100 %	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	n/a	97%	99%	100 %	100 %	n/a	57,85 %	95,83 %	100 %		n/a	64,28 %	98,79 %	100 %	



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan SPM Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan

Uraian	Anggaran Dinas Pendidikan tahun ke-					Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	n/a	3.883.540.000	4.444.157.500	12.816.477.250		n/a	3.393.012.631	4.193.542.125	12.120.000.000		n/a	87,37%	94,36%	95%		14,43%	15,29%
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	n/a	16.437.842.737	23.985.424.000	14.290.450.000		n/a	16.232.259.807	23.099.480.240	14.280.000.000		n/a	96,30%	98,75%	99,92%		45,92%	46,5%
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	n/a	417.391.417	614.011.987	858.585.462		n/a	309.936.250	509.415.516	842.000.000		n/a	74,26%	82,97%	98,06%		47,1%	56,77%



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Kabupaten Seruyan pada periode 2024-2026 ini merupakan estafet dari pembangunan daerah sebelumnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Seruyan pada akhir tahun 2026 nanti. Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan sehingga tak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024-2026, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan telaah terhadap isu strategis internasional, nasional dan regional.



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan:

1. Akses

- a. Masih ada warga masyarakat yang belum menuntaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah perdesaan, wilayah terpencil dan pedalaman;
- b. Masih ada warga masyarakat yang belum menuntaskan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah perdesaan, wilayah terpencil dan pedalaman;
- c. Masih ada warga masyarakat yang belum menuntaskan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah perdesaan, wilayah terpencil dan pedalaman;
- d. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non pendanaan;
- e. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK, APM.

2. Mutu

- a. Perlu adanya peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Perlu adanya peningkatan mutu Pendidikan Khusus terutama bagi penduduk dengan kemampuan Khusus;
- c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Persebaran pendidik belum proporsional;
- e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
- f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;

3. Tata kelola

- a. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
- b. Lemahnya manajemen sekolah;
- c. Kompetisi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan



3.2 Analisis Dampak Covid-19

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didaya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Kabupaten Seruyan 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di dokumen ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut:



Aspek Sosial Budaya

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pada aspek sosial budaya di Kabupaten Seruyan, dapat dipilah menjadi beberapa masalah pokok, yaitu:

A. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan akses pendidikan
Masalah pokok ini dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah, sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/MA/SMK.

APK di Kabupaten Seruyan pada tahun 2013 untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar 60,81 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 84,47 persen, namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya sampai dengan tahun 2020 hingga menjadi 50,26 persen.

2. Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA. Berdasarkan data diketahui bahwa APM Kabupaten Seruyan untuk jenjang SMA pada tahun 2015 sebesar 52,70 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 50,40 persen, namun meningkat kembali pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 52,10 dan 52,59 persen, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 51,39 persen dan 47,87 persen.



3. Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA.
APS Jenjang SMA di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 52,70 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 50,40 persen, namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 52,10 persen, pada tahun 2018 turun menjadi 36,54 persen, dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 51,39 persen, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga menjadi 47,87 persen.
4. Menurunnya angka kelulusan tingkat SMA.
Angka kelulusan SMA di Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 sebesar 99,03 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 berikutnya hingga tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 91,31 persen.
5. Terjadinya penurunan Angka Melanjutkan untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK.
Angka melanjutkan di Kabupaten Seruyan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 92,17 persen, mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 82,64 persen. Meskipun pada tahun berikutnya sempat mengalami peningkatan sampai tahun 2019 menjadi 96,46 persen, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 95,97 persen.



6. Angka melanjutkan di Kabupaten Seruyan dari SMP/MTs ke SMA/SMK pada tahun 2015 sebesar 69,77 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 65,94 persen, namun pada tahun berikutnya terjadi kenaikan hingga tahun 2019 menjadi 75,80 persen, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 67,52 persen.

Keterkaitan masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk aspek sosial budaya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Keterkaitan Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah
Aspek Sosial Budaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kualitas pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan	1. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Jenjang SMA/MA/SMK	a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh orang tua murid. b. Kurangnya kesadaran adanya regulasi PPDB (penerimaan peserta didik baru). c. Kurangnya sarana dan prasarana.
		2. Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA	a. Faktor ekonomi b. Faktor geografis (jarak ke sekolah yang jauh) c. Lingkungan keluarga tidak mendukung
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA	a. Faktor ekonomi b. Kenakalan remaja/ minat sekolah rendah. c. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. d. Belum maksimalnya daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah e. Belum meratanya siswa



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

			untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yg lebih tinggi
		4. Menurunnya angka kelulusan tingkat SMA	a. Faktor ekonomi b. Angka putus sekolah tinggi c. Kenakalan remaja d. Tidak memiliki buku penunjang e. kurangnya pemahaman terhadap materi/ pembelajaran
		5. Terjadinya penurunan Angka Melanjutkan untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK	a. Minat sekolah rendah b. Faktor ekonomi c. Jarak tempat tinggal Kesekolah yang jauh

Isu Strategis

Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah. Adapun isu strategis regional merupakan isu strategis kewilayahan baik level Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Seruyan yang memiliki dampak pada pelaksanaan pembangunan 2024-2026.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten/kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),



Evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD Keempat (2021-2026), berbagai permasalahan pembangunan serta isu strategi pembangunan lainnya, maka Provinsi Kalimantan Tengah ke depan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 KALTENG MAKIN “BERKAH” (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). Sebagai upaya untuk mencapai misi pembangunan tersebut maka dirumuskan Misi Pembangunan jangka menengah periode pembangunan 2021-2026:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan
2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing
5. Meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seruyan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025. Dengan peraturan daerah ini, setiap pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun wajib mengacu pada setiap kebijakan pembangunan dengan berfokus pada pencapaian visi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA”.



Adapun dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seruyan tersebut, dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- c. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
- e. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, maka disusun tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005- 2025 yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Seruyan adil dan sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun untuk pencapaiannya, dirumuskan pula sasaran pokok pembangunan Kabupaten Seruyan yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Terlaksananya sistem jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Seruyan yang terpadu, efisien dan efektif.



- b. Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kabupaten Seruyan.
- c. Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Seruyan.
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
- e. Berkembangnya karakter masyarakat Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.
- g. Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Seruyan.
- h. Makin mantapnya budaya masyarakat Kabupaten Seruyan yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Seruyan semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang.
- b. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Seruyan dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.



- c. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Seruyan dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Seruyan dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdayasaing.

Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Seruyan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.
- b. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan dan pedalaman.
- c. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Seruyan yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.
- b. Meningkatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
- c. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.



- d. Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Seruyan yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.

Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kabupaten Seruyan termasuk wilayah pedalaman, perdesaan.
- b. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- c. Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Seruyan yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.
- d. Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Seruyan.
- e. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kabupaten Seruyan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

ISU STRATEGIS KABUPATEN SERUYAN

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, isu-isu strategis regional, hingga observasi baik dari program kegiatan pembangunan dan sebagainya, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Seruyan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024- 2026.



Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Seruyan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan SDM guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sebagai modal dasar pembangunan, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi suatu potensi besar dalam akselerasi pencapaian tujuan pembangunan yang didasarkan pada kualitas dan pemerataan kesejahteraan sosial. Masih minimnya capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,67 pada tahun 2021, menjadikan Kabupaten Seruyan wajib meningkatkan capaian-capaian pembangunan, khususnya pelayanan dasar masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Capaian pendidikan dan kesehatan yang masih memerlukan peningkatan, menjadikan perencanaan pembangunan wajib memerhatikan kedua urusan tersebut, tanpa mengindahkan urusan pembangunan yang lain. Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Seruyan.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Seruyan, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.



2. Pemulihan perekonomian yang mandiri berbasis sektor unggulan Kabupaten Seruyan memiliki dua sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian wilayah yakni sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Capaian kedua sektor tersebut sangat menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga perlu dijaga stabilitasnya dalam kontribusi nilai tambah produksinya. Seruyan memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang tinggi dikarenakan melimpahnya bahan mentah/barang primer di kawasan Seruyan, khususnya komoditas pertanian.

Kondisi ini menjadi perlu untuk digaungkan, khususnya dalam promosi kepada investor sebagai daya tarik dalam menanamkan modal. Meskipun begitu, iklim investasi harus terus dikondusifkan baik dari sisi sosial maupun keamanan sehingga investor akan terus menanamkan modalnya dalam jangka panjang. Dari sisi pengembangan perekonomian sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit yang cukup mendominasi aktivitas perekonomian Seruyan, maka dalam rangka Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) serta implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau ISPO, maka Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui pola kemitraan telah membentuk Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi melalui SK Bupati Nomor 188.45/305/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Working Group) Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan, yang kemudian diperbaharui dengan SK Bupati Nomor 188.45/145/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit berbasis Yurisdiksi Kabupaten Seruyan.

Merujuk pada Inpres Nomor 6 Tahun 2019. Upaya pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, khususnya kepala sawit di Kabupaten Seruyan, diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam mewujudkan pembangunan perekonomian Seruyan sekaligus menyejahterakan petani, masyarakat adat dan komunitas lokal.



Tata kelola pemerintahan yang baik.

Kinerja pemerintahan memiliki progress positif. Beberapa pencapaian yang cukup baik yakni pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP dengan capaian kategori B. Selain itu, cukup tingginya Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) sebesar 87,59 merupakan hasil positif dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Seruyan. Terjaganya kinerja dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Seruyan ini tentu harus terus dilanjutkan dengan mendorong peningkatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembenahan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas

Seluruh elemen pemerintahan baik perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian maupun penelitian dan litbang harus memiliki sinkronisasi dan integrasi dalam mewujudkan visi pembangunan Seruyan. Selanjutnya, untuk terus meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, maka transformasi pelayanan publik sudah menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan melalui berbagai inovasi dan juga improvisasi dalam memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik berkualitas. Teknologi informasi hadir dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkompeten dan mudah. Hal ini menjadi suatu adaptasi bagi unit pelaksana pelayanan publik guna menjawab kebutuhan masyarakat yang kian meningkat.

Transformasi digital ini nantinya diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dengan cepat dan efisien. Selain itu, layanan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan transparansi pelayanan sehingga terhindar dari kondisi yang tidak diharapkan seperti pungutan liar dan sebagainya.



Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG
ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.



7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan SDM.
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Penyederhanaan Regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir sebagaimana berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, melalui:
 - a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;



- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui:
- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;



- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, melalui:
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga, dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini terdapat beberapa program prioritas, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pengembangan Kurikulum;
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2027

Selain telaahan terhadap isu nasional, hal yang perlu diperhatikan juga dalam menyusun isu strategis Seruyan, yaitu kebijakan atau isu di provinsi. Telaahan terhadap isu/kebijakan provinsi dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2022- 2027 dan beberapa isu atau kondisi terkini yang ada di Kalimantan Tengah. Beberapa Isu strategis yang menjadi isu pembangunan Provinsi Kalimantan

Tengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2027, disajikan sebagai berikut:

- a. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
- b. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.
- c. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah.
- d. Pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- e. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan.
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.
- g. Penggalan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi.
- h. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.



Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan Visi pembangunan Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2022 – 2027 adalah:

**“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil Untuk
Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan
Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat Amanah,
dan Harmonis)”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022-2027 sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam; dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas Sasaran: Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten, dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang.
2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas Sasaran:
 - a. Meningkatnya konektivitas antar daerah, dengan indikator persentase jalan mantap dan persentase konektivitas jalan.



- b. Meningkatnya ketercukupan energi, dengan indikator meningkatnya rasio desa berlistrik dan Rasio elektrifikasi.
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, Daerah Pesisir dan Pantai Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan
4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Sasaran:
 - a. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.
 - b. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator Laju Inflasi dan PDRB perkapita.
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara Konsisten Sasaran:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau, dengan indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB.
 - b. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan tingkat pengangguran terbuka.
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sasaran:
 - a. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - d. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator IPM, rata-ratalama sekolah dan angka harapan usia sekolah
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup.
 - c. Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata Sasaran:
Terpasarkannya destinasi wisata, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan.
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran:
Menurunnya degradasi lingkungan, dengan indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
9. Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Sasaran:
Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, persentase PAD terhadap total pendapatan transfer dan persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seruyan tersebut, misi pembangunan Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;



- c. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
- e. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Seruyan saat ini berada pada tahap ketiga dan tahap keempat.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap ketiga dan keempat dalam RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahap Ketiga dan Keempat

No	Bidang	Arah Pembangunan	
		Tahap Ketiga	Tahap Keempat
1	Pengembangan SDM	Dalam periode ini pendidikan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh meratanya pelaksanaan pendidikan ke segenap kawasan perkotaan dan perdesaan, wajib belajar telah mencapai 12 tahun, sekolah unggulan dan sekolah kejuruan sudah berkembang, serta kualitas pendidikan secara umum	Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah ada dalam tingkat kesadaran yang tinggi yang ditunjukkan oleh pelaksanaan pendidikan ke segenap wilayah telah mencapai 12 tahun dan pendidikan tinggi sudah merupakan kebutuhan. Mayoritas penduduk dalam usia sekolah (dan kuliah) mengenyam dunia pendidikan dengan spesialisasi yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar kerja. Sekolah unggulan dan sekolah kejuruan telah berkembang di



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

telah setara dengan rata-rata nasional.

Pada perkotaan utama sudah dikembangkan pendidikan unggulan bertaraf nasional.

Peningkatan kualitas pendidikan ini akan menjadi pilar utama peningkatan kualitas SDM;

3. Meningkatnya kualitas pendidikan ini sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditopang oleh litbang dan iptek.;

setiap kecamatan, serta kualitas pendidikan umumnya telah ada diatas rata-rata nasional. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat dan nilai kelulusan yang ada diatas rata-rata nasional, kualitas pengajar pendidikan dasar dan menengah telah berpendidikan minimal S1, dan pembinaan - pelatihan telah berjalan menerus.

3. Lebih lanjut perkembangan kualitas SDM ini terus ditopang oleh litbang dan iptek yang juga merupakan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan akan litbang dan iptek ini terus mendorong berbagai lembaga untuk memanfaatkan jasa tersebut, dan berbagai produk litbang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini ditandai oleh semakin berkembangnya wacana tentang perlunya penggunaan hasil penelitian, serta makin munculnya litbang dan penggunaan iptek canggih pada lembaga pemerintah dan swasta.

Sumber: Perda Kab. Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJP Kab. Seruyan Tahun 2005-2025



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

Tabel 3.5
Alternatif Skenario dan Rekomendasi dengan Upaya Tambahan

No. TPB	TUJUAN TPB	ISU STRATEGIS	SESUAI TARGET	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Tidak	Perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisi untuk sekolah menengah	1. Membantu pengembangan manajemen dan pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah 2. Menyediakan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin 3. Mendorong program beasiswa untuk membantu siswa dari kalangan miskin dalam masa transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan.
No. TPB	TUJUAN TPB	ISU STRATEGIS	SESUAI TARGET	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
2	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Tidak	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	1. Penerapan program wajib belajar sembilan tahun 2. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas sekolah 3. Penyediaan bantuan operasional sekolah 4. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pendidikan sesuai standar nasional 5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar untuk semua kalangan
		Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Tidak	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	
		Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Tidak ada data	Peningkatan angka rata-rata lama sekolah	



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

Tabel 3.6

Capaian Indikator TPB Kabupaten Seruyan Tahun 2013 hingga 2020

NO. TPB	TUJUAN TPB	INDIKATOR RPJMD	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN INDIKATOR TPB DAERAH								SESUAI TARGET
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	92,23	95,20	95,60	95,50	95,08	95,60	92,39	97,99	Ya
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	78,86	67,34	70,30	70,40	74,70	74,75	64,91	81,28	Tidak
2	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Angka partisipasi Kasar	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	114.64	108.31	114.62	106.88	106.74	111,11	93,39	116,48	Tidak
		Angka partisipasi kasar	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	99.62	95.3	95.23	92.38	93.22	101,39	70,54	87,42	Tidak
		Angka rata-rata lama sekolah	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	7,81	7,03	7,45	7,49	7,75	7,98	7,75	7,79	Tidak ada data



Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumberdaya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan.

Berpijak dari penelaahan terhadap isu internasional, nasional, provinsi, RPJPD Kabupaten Seruyan serta permasalahan pembangunan Kabupaten Seruyan, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2024-2026, sebagai berikut:

1. Penataan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional.
2. Peningkatan pelayanan pendidikan.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan kondisi perekonomian masyarakat
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan aksesibilitas dari Kuala Pembuang ke Pelabuhan Laut Sigintung, ke wilayah tengah dan wilayah utara Kabupaten Seruyan, serta ke sentra-sentra produksi.
6. Pengelolaan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Peningkatan dan Pengembangan potensi pariwisata, serta pelestarian seni dan budaya lokal yang mendukung pariwisata.



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

8. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah kesejahteraan sosial.
9. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar umat berag



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Seruyan, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Seruyan. Sehingga dapat dilihat keterkaitan perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Sesuai dengan arah pembangunan RPJPD Tahap Ke IV, pembangunan Kabupaten Seruyan diarahkan pada pemerataan pembangunan pada bidang Ekonomi, Infrastruktur, pemerintahan dan Lingkungan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah permasalahan pada masing – masing bidang urusan pembangunan daerah.



Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan data dan informasi pembangunan serta hasil dari analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing – masing bidang urusan, maka diperoleh gambaran permasalahan utama Kabupaten Seruyan yaitu:

“BELUM OPTIMALNYA PEMBANGUNAN SERUYAN YANG ADIL DAN SEJAHTERA”

Hubungan Permasalahan Pokok dan Permasalahan Kabupaten Seruyan Periode Pembangunan 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya kapasitas SDM yang sehat dan berdaya saing	Belum memadai dan meratanya aksesibilitas pelayanan kesehatan
	Sarana prasarana peningkatan pendidikan belum memadai
Meningkatnya angka kemiskinan daerah	Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem
	Minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing
Minimnya upaya perwujudan ketahanan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi ekonomi global	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah
	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan



	Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah belum merata
Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah masih kurang terintegrasi
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh
	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal
	Minimnya upaya peningkatan sistem informasi dalam optimalisasi kualitas pelayanan public
Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi	Meningkatnya aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya adalah penegasan kembali visi dan misi pembangunan Kabupaten Seruyan secara lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahunan. Untuk menjabarkan misi agar lebih fokus, maka ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Seruyan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Selanjutnya pada tabel di bawah ini dimuat atau digambarkan secara jelas keterkaitan antara visi dan misi serta tujuan dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja pencapaian dari masing-masing sasaran dan tujuan pembangunan daerah.



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

Tabel 4.1

**Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD
Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah.	Tahun	7,99	7,89	7,99	8,12	8,17	8,22	8,22
		Harapan lama sekolah.	Tahun	12,02	11,03	11,73	12,20	12,26	12,32	12,32



Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 3 (Tiga) tahun ke depan adalah:

1. Tujuan:

Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat

2. Sasaran Jangka Menengah:

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 secara lengkap termuat dalam Tabel 4.2 di bawah.



EXECUTIVE SUMMARY

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan 2024-2026

Tabel 4.2
Cascading Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (impact)	Program	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mewujudkan Kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah				7,99	7,89	7,99	8,12	8,17	8,22
			Harapan Lama Sekolah				12,02	11,03	11,73	12,20	12,26	12,32
	Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				B (60,24)	B(65,00)	B(68,00)	BB	BB	BB

2.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		Meningkatnya partisipasi Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	100	100	100	100	100
					Meningkatnya partisipasi Warga	Jumlah anak usia 7-18 Tahun	100	100	100	100	100	100

					Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)						
				Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	50,71	50,71	53,94	56,48	59,02	61,56
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	37,33	37,33	40,27	41,72	43,17	44,62
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	60,22	60,22	63,12	66,14	69,16	72,18
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	53,66	53,66	54,80	56,78	58,76	60,74

					Meningkatnya partisipasi sekolah/lembaga yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62,10	62,00	62,10	62,13	62,16	62,19
					Meningkatnya standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	63,00	55,73	63,00	64,00	65,00	66,00
					Meningkatnya partisipasi sekolah/lembaga yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	Indeks Iklim Keamanan SD	85,07	79,37	85,07	88,61	92,15	95,69
						Indeks Iklim Kebinekaan SD	87,26	85,83	87,26	89,75	92,24	94,73

						Indeks Inklusivitas SD	76,38	72,74	76,38	79,49	82,60	85,71
						Indeks Iklim Keamanan SMP	80,21	77,20	80,21	83,55	86,89	90,23
						Indeks Iklim Kebinekaan SMP	77,33	81,26	77,33	79,53	81,73	83,93
						Indeks Inklusivitas SMP	76,36	76,05	76,36	79,49	82,62	85,75

Sumber : Disdik Kab. Seruyan, 2023



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Seruyan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mencapai tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan 2024-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Selanjut, strategi akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan dapat didefinisikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode perencanaan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan melalui Rencana Strategis 2024-2026, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan menerapkan strategi dengan Menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang Pendidikan.

Adapun srategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 5.1 dibawah.



Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan Mutu Belajar, Profesionalisme Pendidik, Kualitas Lembaga/satuan Pendidikan dan Nilai Assesmen dan Akreditasi Sekolah	Perbaikan dan Pemerataan Kualitas Layanan
		Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni Sekolah serta Pemenuhan Pemerataan Pendidik.	Perbaikan dan Pemerataan Akses Layanan Sekolah
		Perbaikan dan Pembinaan Lembaga dan Satuan Pendidikan	Perbaikan Level Akreditasi Sekolah
		Perbaikan Literasi, Numerasi, dan Karakter Peserta didik	Perbaikan Raport Mutu dan SPM Pendidikan
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana TIK Sekolah	Peningkatan Sarana Digitalisasi Sekolah
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Sanitasi Sekolah	Peningkatan Sarana Sanitasi Sekolah



Program Pembangunan Daerah bidang Pendidikan

Strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih sebagai cara atau upaya untuk mencapai sasaran, selanjutnya akan dijabarkan dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Penentuan program pembangunan daerah merupakan proses pemilahan program perangkat daerah berdasarkan *outcome*-nya yang dinilai dapat menunjang secara langsung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Seruyan selama 3 (Tiga) tahun sampai dengan Tahun 2026 berdasarkan misi, tujuan dan sasaran. Hal ini dimaksudkan agar dapat terlihat hubungan langsung antara setiap sasaran dengan program yang akan mendukungnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2-A dan Tabel 5.2-B dan Tabel 5.2-C berikut:

Tabel 5.2 A
Program Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan yang disertai Pagu Indikatif Tahun
2018-2020

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan,Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	MISI 2: Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupunnon formal.				55,611,192,260		63,074,212,841		63,859,647,000	
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan,Impact, Outcome)	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Et	(Rp)	Target	(Rp)	
	T2.1. Meningkatkan kualitas sumber dayamasyarakat	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	67,04		67,57		67,58		
	S2.1.1. Meningkatkan akses dan mutu layananpendidikan.	a. Rata-rata lama sekolah.	Tahun	7,98		7,75		7,79		
		b. Harapan lama sekolah.	Tahun	11,68		11,62		12,33		
		c. Angka Melek Huruf	Persen	98,89		98,87		98,87		
	Program:									
1.01.1.01.01.15.	Program Pendidikan AnakUsia Dini	APK PAUD	Persen	86.53%		87.00%	3,034,613,001	88.00%	3,137,122,000	Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	Persen	APK SD = 106%, APK SMP=100,1%	35,965,793,441	APK SD = 117,2%, APK SMP=100,2%	35,772,988,850	APK SD = 130,2%, APK SMP=103,4%	36,455,920,000	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	Persen	93.22%		93.22%		94.35%		
1.01.1.01.01.18.	Program Pendidikan NonFormal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampaidengan 18 (delapanbelas) tahun yang mendapat Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan	Persen	57.14%	2,906,023,294	57.71%	2,285,264,137	62.29%	2,285,263,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94.50%	16,739,375,525	95.00%	18,590,284,728	96.00%	18,590,283,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.21.	Program Manajemen Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	Persen	80%		82%	847,900,000	84%	847,900,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.31.	Program Pengembangan Prestasi Siswa	Persentase siswa SD/MI berprestasi	Persen	SD = 4%, SMP=3%		SD = 5%, SMP=4%	2,543,162,125	SD = 6%, SMP=5%	2,543,159,000	Dinas Pendidikan

Tabel 5.2-B
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang disertai Pagu Indikatif Tahun
2021-2023

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
			MISI 2: Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal.				78.836.442.813		112.680.372.943		123.293.059.221		
			T2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	IKU 2. Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	69,3		70,12		70,94		70,94	
			S2.1.1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan.	a. Rata-rata lama sekolah.	Tahun	8,73		8,99		9,26		9,26	
				b. Harapan lama sekolah.	Tahun	12,35		12,54		12,74		12,74	
				c. Angka Melek Huruf	Persen	98,93		98,95		98,97		98,97	
			Program :										
1	1	2	Program pengelolaan pendidikan	APK SD /MI	Persen	116,89	75.377.522.503	117,3	107.609.148.863	117,71	118.149.477.589	117,71	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMP/MTs	Persen	105,35		106,7		108,07		108,07	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMA/SMK/MA	Persen	74,04		74,8		75,56		75,56	DINAS PENDIDIKAN
				APM SD/MI	Persen	98,5		99		99,5		99,5	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMP/MTs	Persen	81,32		81,36		81,4		81,4	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMA/MA/SMK	Persen	54,08		54,59		55,11		55,11	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	98,37		98,75		99,13		99,13	DINAS PENDIDIKAN

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAH UN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						202 1		202 2		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	81,69		82,1		82,51		82,51	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	48,68		49,49		50,3		50,3	DINAS PENDIDIKAN
1	1	3	Program pengembangan kurikulum	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	Persen	80%	292.334.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	90%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	Program pendidik dantenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya(%)	Persen	100%	1.560.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.600.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Masyarakat penyelenggara PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Izin operasional (%)	Persen	69%	139.980.800	84%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN

Tabel 5.2-C
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang disertai Pagu IndikatifTahun
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja(Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama sekolah.	Tahun	8,12		8,17		8,22		9,26	
			Harapan lama sekolah.	Tahun	12,20		12,26		12,32		12,74	
		Program :										
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Program pengelolaan pendidikan	Prosentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Persen	100	118.149.477.589	100	107.609.148.863	100	118.149.477.589	100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	100		100		100		100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persen	100		100		100		100	DINAS PENDIDIKAN
		Program pengembang ankurikulum	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	Persen	56,48	1.250.000.000	59,02	1.250.000.000	61,56	1.250.000.000	61,56	DINAS PENDIDIKAN
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	Persen	41,72	1.563.304.416	43,72	1.563.304.416	44,62	1.563.304.416	44,62	DINAS PENDIDIKAN

				Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Masyarakat penyelenggara PAUDdan Pendidikan Nonformal yang memiliki Izin operasional (%)	Persen	66,14	400.000.000	69,16	400.000.000	72,18	400.000.000	72,18	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase sekolah yang melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra	Persen	56,78	300.000.000	58,76	400.000.000	60,74	400.000.000	60,74	DINAS PENDIDIKAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kerangka pendanaan pembangunan yang akan membiayai belanja pembangunan di Kabupaten Seruyan. Kerangka pendanaan untuk pembangunan 3 (Tiga) tahun, tidak terlepas dari hasil proyeksi pada kerangka pendanaan pada Bab ini. Proyeksi kerangka pendanaan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer akan didistribusikan ke belanja program perangkat daerah. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah akan disajikan berdasarkan urusan (wajib dan pilihan) dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Daftar program perangkat daerah yang akan dilaksanakan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 6.1-A, Tabel 6.1-B dan Tabel 6.1-C

Penentuan program perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Penjabaran Sasaran Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan Isu-isu strategis daerah periode 2024-2026.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai urusan dan fungsi penunjang/pendukung pemerintahan daerah yang diampu.

Tabel 6.1-A
Indikasi Rencana Program Prioritas Dinas Pendidikan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				439,792,273,170		531,159,734,451		533,327,453,508	
	BIDANG PENDIDIKAN				64,821,402,740		77,552,876,028		78,213,063,186	
	Dinas Pendidikan				64,821,402,740		77,552,876,028		78,213,063,186	
1.01.1.0 1.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	7,363,309,043	100%	8,757,990,000	100%	9,001,585,186	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Persen	100%	1,562,680,000	100%	4,962,231,750	100%	4,957,610,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan Aparatur (%)	Persen	0%	-	100%	261,200,000	0%	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Persen	80%	284,221,437	80%	284,221,437	80%	284,221,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persen	0%	-	100%	110,000,000	100%	110,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen	0.00%	-	87.00%	3,034,613,001	88.00%	3,137,122,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	Persen	APK SD = 106%, APK SMP=100,1%	35,965,793,441	APK SD = 117,2%, APK SMP=100,2%	35,772,988,850	APK SD = 130,2%, APK SMP=103,4%	36,455,920,000	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	Persen			93.22%		94.35%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	KONDISI AWAL		TAHUN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		
				Kinerja	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1.01.1.0 1.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun yang mendapat Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan	Persen	57.14%	2,906,023,294	57.71%	2,285,264,137	62.29%	2,285,263,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	94.50%	16,739,375,525	95.00%	18,590,284,728	96.00%	18,590,283,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.21.	Program Manajemen Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	Persen	0%	-	82%	847,900,000	84%	847,900,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.25.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM) masyarakat Kabupaten Seruyan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	0%	-	100%	12,000,000	0%	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.0 1.01.31.	Program Pengembangan Prestasi Siswa	Persentase siswa SD/MI berprestasi	Persen	0.00	-	SD = 5%, SMP=4%	2,543,162,125	SD = 6%, SMP=5%	2,543,159,000	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SMP/MTs berprestasi	Persen			3%		3%		
1.01.1.0 1.01.32.	Program Pendidikan Kesetaraan	Angka Melek Huruf	Persen	0%	-	100%	91,020,000	0%	-	Dinas Pendidikan

Tabel 6.2-B
Indikasi Rencana Program Prioritas Dinas Pendidikan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2023

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				689.068.242.961		815.525.310.156		780.983.104.695		
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				233.381.027.239		270.202.771.287		280.628.100.013		
1	1		DINAS PENDIDIKAN				233.381.027.239		270.202.771.287		280.628.100.013		
1	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	156.011.189.936	100%	159.343.622.424	100%	159.428.622.424	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	Program pengelolaan pendidikan	APK SD /MI	Persen	116,89	75.377.522.503	117,3	107.609.148.863	117,71	118.149.477.589	117,71	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMP/MTs	Persen	105,35		106,7		108,07		108,07	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMA/SMK/MA	Persen	74,04		74,8		75,56		75,56	DINAS PENDIDIKAN
				APM SD/MI	Persen	98,5		99,00		99,50		99,50	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMP/MTs	Persen	81,32		81,36		81,4		81,4	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMA/MA/SMK	Persen	54,08		54,59		55,11		55,11	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	98,37		98,75		99,13		99,13	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	81,69		82,1		82,51		82,51	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	48,68		49,49		50,3		50,3	DINAS PENDIDIKAN

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	T					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	1	3	Program pengembangan kurikulum	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	Persen	80%	292.334.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	90%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya(%)	Persen	100%	1.560.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.600.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Masyarakat penyelenggara PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Izin operasional (%)	Persen	69%	139.980.800	84%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN

Tabel 6.2-B

Indikasi Rencana Program Prioritas Dinas Pendidikan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja(Tujuan, Impact, Outcome)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama sekolah.	Tahun	8,12		8,17		8,22		9,26	
			Harapan lama sekolah.	Tahun	12,20		12,26		12,32		12,74	
		Program :										
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Program pengelolaan pendidikan	Prosentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Persen	100	118.149.477.589	100	107.609.148.863	100	118.149.477.589	100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	100		100		100		100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persen	100		100		100		100	DINAS PENDIDIKAN
		Program pengembangan ankurikulum	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	Persen	56,48	1.250.000.000	59,02	1.250.000.000	61,56	1.250.000.000	61,56	DINAS PENDIDIKAN
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	Persen	41,72	1.563.304.416	43,72	1.563.304.416	44,62	1.563.304.416	44,62	DINAS PENDIDIKAN

				Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Masyarakat penyelenggara PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Izin operasional (%)	Persen	66,14	400.000.000	69,16	400.000.000	72,18	400.000.000	72,18	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase sekolah yang melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra	Persen	56,78	300.000.000	58,76	400.000.000	60,74	400.000.000	60,74	DINAS PENDIDIKAN

Tabel 6.2-B

Indikasi Rencana Program Prioritas Dinas Pendidikan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024-2026

Kode					Bidang Urusan Pemerintah n Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2024	Perkiraan Pagu Indikatif Tahun 2025	Perkiraan Pagu Indikatif Tahun 2026
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										266.685.418.567	276.304.357.605	295.990.107.920
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										159.328.622.424	159.428.622.424	169.428.622.424
1	1	1	2 , 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1	0 1	0 1	2 . 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudn ya pemerinta han yang akuntabel	Kab. Seruya n	Terpenuhi nya layanan administra si perkantora n	100 %	jumlah dokumen DPA jumlah dokumen LKjIP, IKU, PK, RAK, RKT jumlah dokumen Profil Pendidikan jumlah dokumen RKA jumlah dokumen SPM Pendidikan	9 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu		650.000.000	650.000.000	650.000.000
1	0 1	0 1	2 . 0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudn ya pemerinta han yang akuntabel	Kab. Seruya n	Terpenuhi nya layanan administra si perkantora n	100 %	jumlah dokumen Renja Pendidikan jumlah dokumen Renstra Pendidikan	3 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu		350.000.000	350.000.000	350.000.000
1	1	1	2 , 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										149.144.046.824	149.244.046.824	149.244.046.824

1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah ASN	14 Bulan	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu		148.507.406.824	148.507.406.824	158.507.406.824
1	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	tersedianya SOP dinas Pendidikan	1 dokumen	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu		536.640.000	636.640.000	636.640.000
1	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah laporan capaian kinerja keuangan	1 dokumen	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu		100.000.000	100.000.000	100.000.000
1	1	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										950.000.000	950.000.000	950.000.000
1	0	0	2	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah BMD yang di kelola	1 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian, penata usahaan Barang Milik Daerah		650.000.000	650.000.000	650.000.000
1	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah Pencatatan data BMD dan Informatif	1 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian, penata usahaan Barang Milik Daerah		300.000.000	300.000.000	300.000.000
1	1	1	2	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										100.000.000	100.000.000	100.000.000
1	0	0	2	0	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi	100 %	jumlah laporan pengelolaan restribusi daerah	1 Dokumen	Terlaksananya pelaporan Retribusi sesuai jadwal		100.000.000	100.000.000	100.000.000

									perkantoran								
1	1	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1.129.800.000	1.129.800.000	1.129.800.000
1	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	Teradministrasi nya kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan kompetensi di bidangnya		229.800.000	229.800.000	229.800.000
1	01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah pegawai	20 Org/bulan	Teradministrasi nya kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan kompetensi di bidangnya		150.000.000	150.000.000	150.000.000
1	01	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah monitoring, evaluasi	177 kali	Teradministrasi nya kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan kompetensi di bidangnya		150.000.000	150.000.000	150.000.000
1	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	Teradministrasi nya kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan kompetensi di bidangnya		500.000.000	500.000.000	500.000.000
1	01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah bimbingan teknis	100 Orang	Teradministrasi nya kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan kompetensi di bidangnya		100.000.000	100.000.000	100.000.000
1	01	01	205		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2.856.951.200	2.856.951.200	2.856.951.200

				06													
1	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah jenis komponen instalasi listrik dan alat listrik yang disediakan	9 unit	Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dengan baik		50.000.000	50.000.000	50.000.000
1	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan waktu, jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dengan baik		800.000.000	800.000.000	800.000.000
1	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dengan baik		20.000.000	20.000.000	20.000.000
1	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu, jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dengan baik		286.951.200	286.951.200	286.951.200
1	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu, jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dengan baik		200.000.000	200.000.000	200.000.000
1	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi ke dalam/luar daerah	167 kali	Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dengan baik		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000

1	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit			200.000.000	200.000.000	200.000.000
1	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah dan jenis mebeleur yang disediakan	5 paket			200.000.000	200.000.000	200.000.000
1	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	3 unit 5 paket			500.000.000	500.000.000	500.000.000
1	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah bahan dan alat yang digunakan untuk pemeliharaan	100 set			500.000.000	500.000.000	500.000.000
1	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.770.000.000	1.770.000.000	1.770.000.000
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis surat yang disediakan	2500 buah			45.000.000	45.000.000	45.000.000
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			575.000.000	575.000.000	575.000.000
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administra	100 %	jumlah dan jenis peralatan kantor yang diperbaiki	25 unit			150.000.000	150.000.000	150.000.000

					Perlengkapan Kantor		han yang akuntabel		si perkantoran								
1	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah tenaga administrasi kantor	12 bulan			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										977.824.400	977.824.400	977.824.400
1	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah kendaraan dinas/operasional jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9 unit 1 unit			277.824.400	277.824.400	277.824.400
1	01	01	209	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah penyedia jasa	12 bulan			200.000.000	200.000.000	200.000.000
1	01	01	209	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Reformasi Birokrasi.	1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Kab. Seruyan	Terpenuhi nya layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	15 paket			500.000.000	500.000.000	500.000.000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										118.149.477.589	118.149.477.589	118.149.477.589
1	1	2	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										57.896.469.960	57.896.469.960	57.896.469.960
1	01	02	201	01	Pembangunan Unit	Peningkatan dan pemerataan	Meningkatnya akses dan mutu	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD,	100%	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	1 Unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan		1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000

			01		Sekolah Baru (USB)	n pelayanan Pendidikan	layanan pendidikan		APK SD/MI dan APK SMP/MTS				Pendidikan Sekolah Dasar				
1	01	02	201	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah penambahan ruang kelas sekolah SD	28 Unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
1	01	02	201	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun	5 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
1	01	02	201	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun	1 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
1	01	02	201	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	5 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	01	02	201	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun	4 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	01	02	201	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun	4 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	01	02	201	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Peningkatan dan pemerataan pelayanan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan	100%	Jumlah ruang kelas yang di rehabilitasi	11 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000

						Pendidikan			APK SMP/MTS									
1	01	02	201	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah ruang yang di rehabilitasi	11 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	
1	01	02	201	14	Pengadaan Mebeliur Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah mebeleur sekolah SD yang tersedia	8 paket	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
1	01	02	201	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah perlengkapan siswa	1 paket	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		3.297.104.000	3.297.104.000	3.297.104.000	
1	01	02	201	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah peserta didik pelaksanaan ujian	6883 orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		300.000.000	300.000.000	300.000.000	
1	01	02	201	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah peserta didik pelaksanaan ujian	6883 orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		300.000.000	300.000.000	300.000.000	
1	01	02	201	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah peserta sosialisasi dan pelaksanaan sekolah sehat	100 orang 50 orang 300 orang 240 orang 10 kecamatan 100 orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		800.000.000	800.000.000	800.000.000	

1	0	0	2	2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah tenaga GTT, PTT, PKD	200 Orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		9.791.604.960	9.791.604.960	9.791.604.960
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah Peserta Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000	500.000.000	500.000.000
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan			jumlah sekolah penerima dana BOS tingkat SD	171 sekolah			15.407.761.000	15.407.761.000	15.407.761.000
1	1	2	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										42.884.093.101	42.884.093.101	42.884.093.101
1	0	0	2	0	Penambahan Ruang Kelas Baru	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah.	4 ruangan	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
1	0	0	2	0	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Terbangangunnya ruang guru/kepala sekolah/TU	6 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
1	0	0	2	0	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Terbangunnya ruang unit kesehatan sekolah	2 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000

1	0	0	2	0	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Terbangunnya perpustakaan sekolah	1 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	600.000.000	600.000.000	600.000.000
1	0	0	2	0	Pembangunan Laboratorium	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah laboratorium sekolah yang dibangun	5 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	0	0	2	0	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah ruang serba guna/aula sekolah yang dibangun	1 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	1.364.318.000	1.364.318.000	1.364.318.000
1	0	0	2	0	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	5 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	0	0	2	1	Pembangunan Fasilitas Parkir	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Terlaksananya pembangunanan fasilitas parkir	1 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1	0	0	2	1	Pembangunan Kantin Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Terbangunnya pembangunan kantin sekolah	1 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1	0	0	2	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang dibangun	2 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	800.000.000	1.240.768.137	2.000.000.000

1	0	0	2	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah	2 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	2.500.000.000	3.578.170.901	3.578.170.901
1	0	0	2	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	2 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	2.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
1	0	0	2	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Terlaksannaya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah	1 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	1.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
1	0	0	2	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana utilitas sekolah	2 unit	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	800.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
1	0	0	2	2	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah pengadaan mebeleur sekolah	3 paket	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	800.000.000	800.000.000	800.000.000
1	0	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa	1 paket	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah peserta didik pelaksanaan ujian	2624 orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	500.000.000	500.000.000	500.000.000

1	0	0	2	3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah peserta penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan menengah	2624 orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		500.000.000	500.000.000	500.000.000
1	0	0	2	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah peserta kegiatan olimpiade siswa nasional SMP	230 orang 230 orang 100 orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		800.000.000	800.000.000	1.548.703.491
1	0	0	2	3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	Jumlah GTT, PTT, PKD	250 Orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		5.894.647.200	5.894.647.200	5.894.647.200
1	0	0	2	4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah	50 Orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		400.000.000	800.000.000	800.000.000
1	0	0	2	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	10 kecamatan	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		400.000.000	400.000.000	800.000.000
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah sekolah penerima dana BOS tingkat SMP	69 sekolah	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama		7.446.957.000	7.446.957.000	7.446.957.000
1	1	2	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										13.868.914.528	14.868.914.528	17.668.914.528

				0 3													
1	0 1	0 2	2 0 3	0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	11 unit	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini		500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1	0 1	0 2	2 0 3	0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	1 unit	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini		850.000.000	850.000.000	850.000.000
1	0 1	0 2	2 0 3	0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	2 unit	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini		400.000.000	400.000.000	1.500.000.000
1	0 1	0 2	2 0 3	0 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	1 unit	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini		300.000.000	300.000.000	1.200.000.000
1	0 1	0 2	2 0 3	0 7	Pengadaan Mebel PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah pengadaan mebeleur sekolah PAUD	3 unit	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini		400.000.000	400.000.000	800.000.000
1	0 1	0 2	2 0 3	1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah lembaga PAUD penerima Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1 paket	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini		200.000.000	200.000.000	500.000.000
1	0 1	0 2	2 0 3	1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah peserta kegiatan jumlah peserta kegiatan PORSENI tingkat PAUD	70 orang 10 kecamatan	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini		150.000.000	150.000.000	200.000.000

1	0	0	2	1	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah peserta kegiatan	100 orang	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	150.000.000	150.000.000	200.000.000
1	0	0	2	1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS		jumlah GTT, PTT, PKD	12 bulan	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	5.705.514.528	5.705.514.528	5.705.514.528
1	0	0	2	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PAUDNI	100 orang	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	800.000.000	800.000.000	800.000.000
1	0	0	2	1	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah lembaga penerima BOP PAUD	196 lembaga	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	4.413.400.000	4.413.400.000	4.413.400.000
1	1	2	2	0	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									2.500.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000
1	0	0	2	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 unit	Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1	0	0	2	1	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah kegiatan mendata PNF jumlah peserta kegiatan jumlah peserta kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan jumlah peserta paket A setara SD	1 dokumen 10 kecamatan 60 orang 55 orang 65 orang	Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	150.000.000	150.000.000	150.000.000

										jumlah peserta paket B setara SMP							
1	01	02	204	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah peserta kegiatan jambore PAUD dan DIKMAS	10 kecamatan	Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal /Kesetaraan		300.000.000	300.000.000	300.000.000
1	01	02	204	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah Kegiatan pemberdayaan tenaga pendidik non formal	1 kegiatan 50 orang 130 lembaga	Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal /Kesetaraan		100.000.000	100.000.000	200.000.000
1	01	02	204	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTS	100%	jumlah lembaga non formal penerima dana operasional	10 lembaga	Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal /Kesetaraan		1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										1.250.000.000	1.250.000.000	1.800.000.000
1	1	3	201		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										800.000.000	800.000.000	1.050.000.000
1	01	03	201	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	80%	jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum pendidikan dasar	10 kecamatan	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		150.000.000	150.000.000	250.000.000

1	0	0	2	0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	80%	jumlah penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	10 kecamatan	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		150.000.000	150.000.000	250.000.000
1	0	0	2	0	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	80%	jumlah penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	10 kecamatan	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		200.000.000	200.000.000	250.000.000
1	0	0	2	0	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	80%	jumlah pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	10 kecamatan	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		300.000.000	300.000.000	300.000.000
1	1	3	2	0	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										450.000.000	450.000.000	750.000.000
1	0	0	2	0	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	80%	jumlah peserta kegiatan pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	148 orang	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal		150.000.000	150.000.000	250.000.000
1	0	0	2	0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	80%	jumlah kegiatan penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	10 kecamatan	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal		150.000.000	150.000.000	250.000.000

1	0	0	2	0	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	80%	jumlah penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	10 kecamatan	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal		150.000.000	150.000.000	250.000.000
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										1.563.304.416	1.563.304.416	1.563.304.416
1	1	4	2	0	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										1.563.304.416	1.563.304.416	1.563.304.416
1	0	0	2	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan dan pemerataan pelayanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruyan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%	jumlah guru yang penetapan angka kredit dalam 1 tahun jumlah kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan jumlah kelompok kerja guru jumlah layanan kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan jumlah peserta kegiatan penyenggaraan pelatihan seminar dan loka karya serta diskusi ilmiah berbagai ilmu pendidikan jumlah peserta pelatihan pendidikan PAUD jumlah peserta seleksi pelatihan tenaga PTK PNF jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum jumlah peserta yang	150 orang 3 kegiatan 20 kelompok 10 kecamatan 200 orang 70 orang 70 orang 213 orang 62 orang	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.463.304.416	1.463.304.416	1.463.304.416

										mengikuti seleksi guru prestasi							
1	01	04	201	02	Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Peningkata n dan pemerataa n pelayanan Pendidikan .	Meningkat nya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruya n	Persentas e Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%	jumlah gaji guru kontrak jumlah peserta kegiatan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	340 orang	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100.000.000	100.000.000	100.000.000
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN										400.000.000	400.000.000	400.000.000
1	1	5	202		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										400.000.000	400.000.000	400.000.000
1	01	05	202	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggara kan oleh Masyarakat	Peningkata n dan pemerataa n pelayanan Pendidikan .	Meningkat nya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruya n	Persentas e Lembaga PAUD yang Berizin dan Operasion al(%)	50%	jumlah peserta kegiatan	67 Lembaga	Terlaksananya Penerbitan Izin sekolah yang diselenggarakan masyarakat		400.000.000	400.000.000	400.000.000
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA										300.000.000	400.000.000	600.000.000
1	01	06	201		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										300.000.000	400.000.000	600.000.000
1	01	06	201	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan	Peningkata n dan pemerataa n pelayanan Pendidikan .	Meningkat nya akses dan mutu layanan pendidikan	Kab. Seruya n	Persentas e Siswa Pengapres iasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenang an	50%	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah	100%	300.000.000	400.000.000	600.000.000

					Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota								
TOTAL															281.091.404.429	281.191.404.429	281.191.404.429



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sementara indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pada RPD memuat kinerja dampak (*impact*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator keluaran (*output*) dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah. Kinerja hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Bab ini memuat indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan periode 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1, Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan merupakan Indikator Kinerja Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. Sementara Tabel 7.2 menyajikan Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah dan Tabel 7.3 merupakan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah.



Indikator kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RPD Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024, RPD. Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam empat program meliputi:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
5. Program Pengembangan bahasa dan sastra.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 (terlampir):

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJASASARAN (Dampak/Impact)	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Angka Rata-rata lamasekolah	Tahun	8,99	9,26	7,75	7,79	8,12	8,17	8,22	8,22	Dinas Pendidikan
2	Angka Harapan LamaSekolah	Tahun	12,54	12,74	11,62	12,33	12,25	12,20	12,26	12,32	Dinas Pendidikan
3.	Nilai SAKIP	Nilai	C (47,62)	B (60,24)	B (60,24)	B	BB	BB	BB	BB	Dinas Pendidikan

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2021	2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Layanan Urusan Wajib Dasar										
A	Pendidikan										
1	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Persen	100	100	76,76	66,91	100	100	100	100	Dinas Pendidikan

1.2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	100	100	97,07	96,52	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persen	100	100	4,32	7,02	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	48,08	54,07	48,08	54,07	59,16	59,02	61,56	61,56	Dinas Pendidikan
1.5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	36,35	41,86	36,35	41,86	44,77	43,17	44,62	44,62	Dinas Pendidikan
1.6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	58,70	64,09	58,70	64,09	70,13	69,16	72,18	72,18	Dinas Pendidikan
1.7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	52,72	54,54	52,72	54,54	58,51	58,76	60,74	60,74	Dinas Pendidikan
1.8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	64,49	62,00	64,49	62,00	62,06	62,16	62,19	62,19	Dinas Pendidikan
1.9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Persen	55,64	55,73	55,64	55,73	58,23	65,00	66,00	66,00	Dinas Pendidikan
1.10	Indeks Iklim Keamanan SD	Persen	71,06	79,37	71,06	79,37	86,45	92,15	95,69	95,69	Dinas Pendidikan
1.11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Persen	62,95	85,83	62,95	85,83	90,81	92,24	94,73	94,73	Dinas Pendidikan
1.12	Indeks Inklusivitas SD	Persen	68,78	72,74	68,78	72,74	78,94	82,60	85,71	85,71	Dinas Pendidikan
1.13	Indeks Iklim Keamanan SMP	Persen	75,94	77,20	75,94	77,20	83,88	86,89	90,23	90,23	Dinas Pendidikan
1.14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Persen	61,92	81,26	61,92	81,26	85,68	81,73	83,93	83,93	Dinas Pendidikan
1.15	Indeks Inklusivitas SMP	Persen	67,38	76,05	67,38	76,05	82,25	82,62	85,75	85,75	Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Indikator Kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan yang menjadi landasan dalam menentukan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode	Tahun			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode
				2024	2025	2026	
1	Angka Partisipasi sekolah						
1.1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase	100	100	100	100	100
1.2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persentase	100	100	100	100	100
1.3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah/pendidikan kesetaraan	Persentase	100	100	100	100	100
2	Literasi dan Numerasi						
2.1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	53,94	56,48	59,02	61,56	61,56
2.2	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	40,27	41,72	43,17	44,62	44,62
2.3	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	63,12	66,14	69,16	72,18	72,18
2.4	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	54,80	56,78	58,76	60,74	60,74
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
3.1	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	62,10	62,13	62,16	62,19	62,19
3.2	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi	Persentase	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00

	Akademik Paling Rendah D-IV/S1						
4	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas						
4.1	Indeks Iklim Keamanan SD	Nilai	85,07	88,61	92,15	95,69	95,69
4.2	Indeks Iklim Keamanan SMP	Nilai	80,21	83,55	86,89	90,23	90,23
4.3	Indeks Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	87,26	89,75	92,24	94,73	94,73
4.4	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	77,33	79,53	81,73	83,93	83,93
4.5	Indeks Iklim Inklusivitas SD	Nilai	76,38	79,49	82,60	85,71	85,71
4.6	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	76,36	79,49	82,62	85,75	85,75



BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Seruyan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan pada Rencanan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024, RPD Daerah kabupaten Seruyan tahun 2024-2026, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada proses Perubahan Renstra berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi ketercapaian Isu-isu Strategis Kabupaten Seruyan.

Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Perubahan Renstra ini belum sempurna, sehingga masukan dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan renstra ini ke depan.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan



RUSMI HIDAYAT, S.Sos

NIP. 19790821 200501 1 009